

SKRIPSI

KK
Per 94/99
Saf
t

NORMAN SAFRIL

**TINJAUAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH
PERKEBUNAN KETAJEK, JEMBER, OLEH P.D.P
KABUPATEN JEMBER, DI JAWA TIMUR
(STUDI KASUS TENTANG RECLAIMING ATAS
TANAH PERKEBUNAN KETAJEK, JEMBER, DI JAWA TIMUR)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

1999

**TINJAUAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH
PERKEBUNAN KETAJEK, JEMBER, OLEH P.D.P
KABUPATEN JEMBER, DI JAWA TIMUR
(STUDI KASUS TENTANG RECLAIMING ATAS
TANAH PERKEBUNAN KETAJEK, JEMBER, DI JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

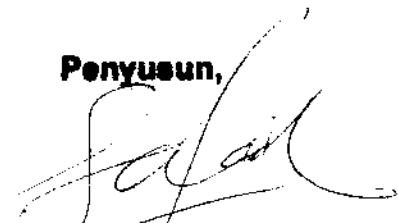
**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Eman Ramelan, S.H., M.S.
NIP. 131 286 715

Penyusun,



NORMAN SAFRIL
NIM. 039514138

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

Bab IV

Penutup

I. Kesimpulan

- a. Bahwa penguasaan tanah perkebunan di Ketajek I dan II oleh P.D Perkebunan Ketajek Kabupaten Jember, berdasarkan kepada SK Mendagri No.SK.12/HGU/DA/1974 tanggal 29 Agustus 1974. Dalam hal ini Mendagri memberikan SK tersebut berdasarkan pada permohonan HGU dari Bupati Jember Abdul Hadi tertanggal 3 Juli 1972, serta persetujuan dari Panitia Pertimbangan Perkebunan Jawa Timur 26 Juli 1972 dan Team Pertimbangan HGU Perkebunan Besar tertanggal 11 September 1973.
- b. Bahwa akibat dari penguasaan tanah perkebunan oleh P.D.P Kabupaten Jember menimbulkan reclaiming (penuntutan kembali) yang dilakukan rakyat Ketajek diatas Tanah Perkebunan Ketajek I dan II Kabupaten Jember dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu 1) menyurati, berdialog, dengan pihak-pihak yang berwenang, dan 2) dilakukan dengan cara menduduki lahan perkebunan Ketajek I dan II tersebut. Cara pertama tersebut dibolehkan karena tidak melanggar hukum yang berlaku. Sedangkan cara yang kedua tidak diperbolehkan karena melanggar hukum yang berlaku.
- c. Bahwa penyelesaian melalui jalur hukum atau melalui proses peradilan merupakan alternatif terakhir jika proses musyawarah dan perundingan untuk mencari penyelesaian tidak tercapai kata sepakat.

2. Saran :

- a. Dalam pelaksanaan proses perolehan HGU atas tanah perkebunan di Ketajeg I dan II Kabupaten Jember, seharusnya ditempuh dulu proses pelepasan hak atas tanah. Dan diadakan musyawarah dengan pihak petani mengenai mengenai besarnya ganti kerugian tersebut serta dihindarkan cara kekerasan dalam perolehan HGU tersebut. Sehingga dengan demikian sengketa-sengketa yang timbul akibat adanya proses perolehan HGU tersebut dapat dihindarkan.
- b. Bahwa redistribusi tanah perkebunan harus diberikan atau diprioritaskan kepada petani yang dahulu mendapatkan hak milik sehingga redistribusi tanah perkebunan tersebut benar-benar sesuai dengan sasaran dari Landreform untuk mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian yang adil dan merata.